

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dimasa sekarang ini, membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia, terutama pemanfaatan teknologi informasi dilingkungan organisasi yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi untuk mencapai efisien dan efektivitas organisasi, dengan berbagai bentuk aplikasi teknologi informasi. Aplikasi teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi, dimana dalam aplikasi teknologi informasi terdiri dari proses mengumpulkan, mengirimkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data-data yang disebabkan oleh aktivitas atau operasi organisasi yang bertujuan mempercepat pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut.

Keberhasilan sistem informasi suatu organisasi tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan (Goodhue dalam Jumaili, 2005). Semakin cepatnya waktu untuk mengakses dan *output* sistem yang dihasilkan sesuai dengan apa yang di inginkan *user* maka intensitas pemakaian sistem akan meningkat. Pemakaian yang berulang-ulang ini dapat dimaknai adanya sebuah kepuasan oleh user. Sering ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi kurang memberikan manfaat

atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam peningkatan kinerja individu.

Faktor-faktor yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan sistem informasi adalah kualitas informasi (*information quality*), kualitas sistem informasi (*system quality*), kualitas pelayanan (*service quality*), intensitas penggunaan sistem informasi (*use*), kepuasan pengguna akhir sistem informasi (*end user satisfaction*), dampak individual (*individual impact*), dan dampak organisasional (*organizational impact*) dari sistem informasi, agar kualitas sistem menjadi baik maka dibutuhkan sistem aplikasi yang baik pula untuk dapat mengolah data menjadi informasi yang berguna. Kepuasan pengguna sistem informasi dapat dikatakan telah tercapai jika sistem informasi dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna sistem informasi dan mampu meningkatkan kinerja mereka secara optimal (DeLone, 2003).

Penerapan sistem informasi di pemerintah daerah merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan *good governance* yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Setiap sistem informasi yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dan *stakeholder* pemerintah daerah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan

dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah direalisasikan alat bantu pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD memfasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparansi, efektif dan efisien dan pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, akurat dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Kualitas sistem informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem yang handal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual

Akuntansi berbasis akrual mengakomodir transaksi ekonomi dan peristiwa yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Simanjuntak, 2010). Manfaat penggunaan metode berbasis akrual ini diharapkan akuntansi pemerintahan mampu memperbaiki kinerja pemerintahan secara keseluruhan, baik dalam hal penyusunan anggaran maupun realisasi anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus dapat menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dikelompokkan dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan kelompok laporan finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Dalam laporan finansial terdapat laporan operasional yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Sebagai konsekuensi terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka berdampak besar terhadap alat bantu Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, alat bantu tersebut adalah aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD yang sudah di implementasikan dengan metode aplikasi basis kas harus dilakukan penyesuaian metode aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Penyesuaian aplikasi SIPKD sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan merubah alur aplikasi dari basis kas menjadi basis akrual. Dalam pelaksanaan penyesuaian aplikasi SIPKD tersebut tentunya sangat mempengaruhi terhadap pola implementasi aplikasi misalnya tentang perlakuan aplikasi ketika menatausahakan pendapatan dari pengakuan target pendapatan, terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sampai dengan dilunasinya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan pelaksanaan jurnal akuntansi terhadap transaksi – transaksi tersebut.

Upaya pemerintah daerah menyesuaikan aplikasi SIPKD basis kas menjadi SIPKD basis akrual, target yang ingin dicapai adalah tersedianya alat bantu berupa aplikasi yang mampu menterjemahkan segala proses transaksi dalam pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan basis akrual yang di atur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual baik dari sisi penatausahaan maupun dari sisi hasil akhir proses penatausahaan aplikasi yaitu terbitnya Pelaporan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidak sesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang , kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya (Bago, 2013).

Kasus yang dihadapi Pemerintahan Kota Sawahlunto bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum mampu menghasilkan seluruh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2014. Hal ini ditandai dengan dimanfaatkannya SIMDA-BPKP dalam penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 (Silvia, 2014).

Penggunaan aplikasi SIPKD dalam penganggaran dan penatausahaan telah mampu menghasilkan laporan secara efektif , namun dalam penyusunan LKPD, SIPKD masih memiliki banyak kelemahan termasuk beberapa fasilitas prosedur yang dibutuhkan daerah dan pada awal tahun 2015, tiga dari sampel penelitian beralih menggunakan SIMDA karena adanya kekhawatiran ketidakmampuan SIPKD dalam penerapan akuntansi berbasis akrual (Suhairi, 2015).

Perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis akrual yang berdampak langsung ke perubahan metode dan alur aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini SIPKD, menjadi tantangan serta target utama pemerintah daerah untuk melaksanakan penyesuaian aplikasi dari metode basis kas menjadi aplikasi dengan metode basis akrual, hal ini juga dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Sijunjung sebagai konsekuensi pelaksanaan perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis akrual.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang analisis penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dimana harus dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Sijunjung?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berbasis akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berbasis akrual di Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)

berbasis akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber acuan evaluasi pemakaian SIPKD dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual.
2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memperluas wawasan penulis mengenai penerapan SIPKD dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual.
3. Bagi akademisi, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

#### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dengan fokus yang diteliti adalah SIPKD sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual, yaitu kesesuaian SIPKD dengan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 yaitu dengan membandingkan alur aplikasi, membandingkan jurnal dan dalam menghasilkan laporan keuangan daerah. Dalam menilai kesuksesan SIPKD dalam membantu

pelaksanaan SAPD berbasis akrual dengan melihat kualitas sistem informasi yang dihasilkan yang terdiri atas keakuratan, relevan dan ketepatan waktu.

